Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 39040-39046

Implementasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Larasati Suci Arumsari, Tomi Oktavianor
Universitas Lambung Mangkurat, Email; larasatibartim@gmail.com
Universitas Lambung Mangkurat, Email; tomi.oktavianor@ulm.ac.id

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan dyang baik akan berdampak terhadap pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan demokrasi lokal. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh teknologi informasi yang baik. Sebagai instansi pemerintah Kecamatan Dusun Timur sejak tahun anggaran 2023 telah menggunakan secara aplikasi SIPD-RI sebagai aplikasi pengelolaan keuangan. Aplikasi ini diciptakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai satu-satunya aplikasi yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini membahas Implementasi Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD-RI dari perspektif pengguna. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa triangulasi. Hasil penelitian, menunjukan bahwa dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD-RI di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan kurang terimplementasi, dalam hal ini terlihat dari tercapainya indikator, komunikasi dan disposisi. Sedangkan, indikator sumber daya dan struktur birokrasi belum optimal. Beberapa faktor menjadi penghambat implementasi, antara lain yaitu: 1). Ketidaktepatan waktu Juknis SIPD-RI, keterlambatan juknis menyebabkan kesalahan input data dan pelaporan tertunda, sehingga sosialisasi dan juknis tepat waktu sangat dibutuhkan. 2). Keterbatasan kapasitas aparatur, kompetensi belum merata, personel terbatas, dan rotasi pegawai menurunkan efisiensi; pelatihan dan pendampingan diperlukan. 3). Terbatasnya sarana teknologi, perangkat keras dan jaringan internet yang terbatas memperlambat penginputan data, sehingga peningkatan infrastruktur sangat diperlukan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, SIPD-RI, Kecamatan Dusan Timur.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Electronic Government (E-Government) telah menjadi pendekatan strategis dalam transformasi tata kelola pemerintahan modern. Sebagai paradigma yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, E-Government bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk meningkatkan kualitas dari perencanaan serta penganggaran tersebut sangat diperlukan akuntabilitas keuangan yang memadai, sehingga dapat memberikan nilai tambahan Early Warning sebagai fungsi perencanaan dan penganggaran, dimana pelaporan keuangan pemerintah daerah harus mampu memuat informasi yang dibutuhkan oleh SKPD sebagai perangkat daerah.

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk mengetahui apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan yang telah dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Rahman & Permatasari, 2021).

Berdasarkan dengan adanya peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, berkaitan pada tanggal 14 Oktober 2019 Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah meluncurkan (*launching*) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Fenomena perubahan sistem pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan, menjadi salah satu tantangan dalam proses pengelolaan keuangan. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD RI mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru. Pasalnya, pada aplikasi sebelumnya yaitu SIMDA FMIS menyediakan fitur-fitur lengkap yang mencakup seluruh proses pencatatan keuangan, mulai dari pencatatan jurnal harian hingga penyusunan laporan. Selain perubahan dari SIMDA FMIS ke SIPD RI, tantangan baru muncul dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan SIPD RI mulai tahun anggaran 2025. SIPD RI, yang dirancang sebagai aplikasi umum, tidak hanya dapat digunakan oleh pemerintah daerah seperti SIPD, tetapi juga dirancang untuk mendukung kementerian/lembaga lain sebagai upaya menyatukan berbagai aplikasi yang tersebar di banyak institusi (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, 2023).

Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, merupakan salah satu instansi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Sebelumnya, kecamatan ini telah menggunakan SIMDA FMIS sebagai sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, perkembangan teknologi yang pesat serta tuntutan perubahan kebijakan dan regulasi mendorong kebutuhan akan sistem informasi yang lebih modern. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi SIMDA FMIS kemudian digantikan dan diintegrasikan ke dalam SIPD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Kantor Kecamatan Dusun Timur menunjukkan bahwa terkait penggunaan SIPD RI Meskipun SIPD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, masih menemui sejumlah kendala. Salah satu kendala adalah tidak adanya pelatihan khusus bagi aparatur kecamatan terkait penggunaan aplikasi SIPD RI. Ketiadaan pelatihan berdampak terbatasnya pemahaman aparatur dalam mengoperasikan sistem. Selain kendala SDM, terdapat juga permasalahan pada aspek teknis, khususnya dalam administrasi (SPP) Gaji. Proses administrasi ini dinilai tidak sederhana karena setiap komponen pemotongan, seperti BPJS Kesehatan, (JKK), (JKM) serta Iuran Wajib Pegawai (IWP 1% dan 8%), harus diinput secara manual ke dalam sistem. Padahal, data nominal untuk komponen tersebut tidak tersedia langsung di aplikasi SIPD RI, melainkan harus diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda.

Hal yang sama ditemukan oleh Naila (2023) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kab. HSU menyatakan bahwa penggunaan SIPD-RI pada Kab. HSU belum optimal, di karenakan terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, belum adanya SOP terkait SIPD-RI dari BPKAD, menu SIPD-RI belum maksimal dan keterlambatan perbaikan dari pusat. Secara keseluruhan, implementasi SIPD di berbagai daerah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi dan stabilisasi aplikasi, serta koordinasi antar unit kerja perlu diatasi untuk mencapai efektivitas maksimal. Maka, fokus penelitian diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD RI dari perspektif pengguna. Jika penelitian terdahulu lebih banyak membahas sosialisasi dan pelatihan, maka penelitian ini menitikberatkan pada pengalaman pengguna serta kualitas sistem.

Tujuan utama mengetahui, menganalisis, mendeskripsikan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi pengelolaan keuangan berbasis SIPD-RI di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

METODE PENELITIAN

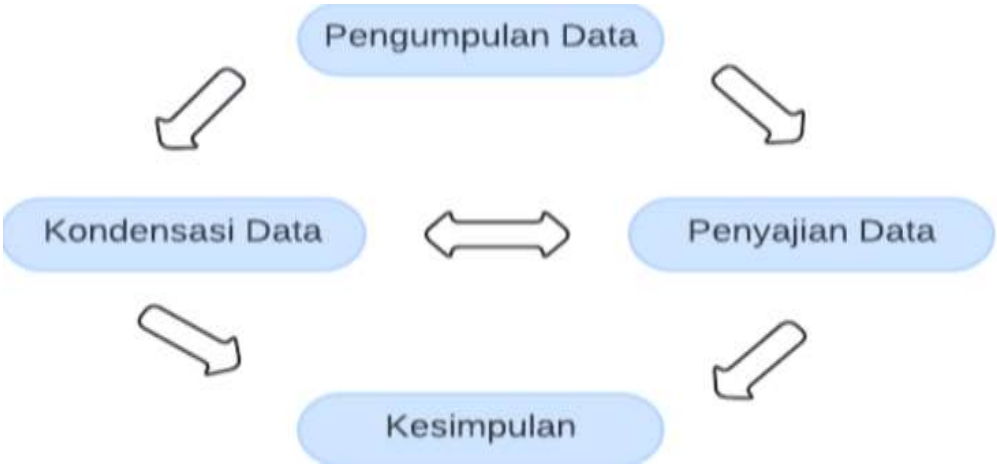
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan bersumber dari materi-materi non-angka atau bukan dalam bentuk data numerik. Data ini dapat berasal dari wawancara, memo catatan, dan dokumen resmi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang kompleks, proses sosial, dan konteks spesifik tanpa memerlukan perlakuan eksperimen. Hasil dari penelitian kualitatif ini adalah penyajian informasi atau penjelasan yang bersifat faktual berdasarkan pengamatan, tanpa melakukan manipulasi data. Creswell (2016:74), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer
   Data primer merupakan sumber data yang berasal atau diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian.
2. Sumber data sekunder
   Data sekunder adalah data yang diperoleh secata tidak langsung dari informan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari dokumen, jurnal, atau buku.

Penentuan sumber data dilakukan peneliti dengan berusaha mencari sumber-sumber yang bisa menghasilkan data selengkap mungkin, mulai dari mencari pihak yang dapat dijadikan narasumber dalam penelitian di lokasi penelitian penulis hingga memilah data informasi dari berbagai sumber yang tersedia di lokasi penelitian seperti jurnal atau sumber lainnya yang memuat informasi tekait masalah yang peneliti teliti.

Creswell, (2016:261), data merupakan catatan atau kumpulan fakta yang berupa hasil pengamatan empiris pada penelitian. Data dapat berupa angka, kata atau dokumen yang berfungsi untuk menjelaskan variabel penelitian sehingga memiliki makna yang dapat dipahami. Data penelitian berarti catatan fakta empiris tentang masalah yang diteliti. Data penelitian dikumpulkan dan dianalisis untuk dijadikan dasar penarikan simpulan dalam penelitian. Hal itu berkaitan dengan secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, keterkaitan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah mencari pola dalam analisis data, peneliti perlu "memisahkan". Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatory sebelum melakukan reduksi data. Anticipatory data reduction is occurring as the research decides (often without full awareness) which conceptual frame work, which sites, which research question, which data collection approaches to choose. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukan pada gambar 3.1 sebagai berikut:



Sumber : Miles dan Huberman, dalam Creswell (2016)
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dirancang untuk mewujudkan pengelolaan informasi pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berkualitas sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Bagi pemerintah daerah, termasuk kecamatan, penerapan SIPD menjadi keharusan dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kualitas laporan keuangan mencerminkan tertibnya pengelolaan keuangan daerah, baik dari segi administrasi maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam rangka melihat sejauh mana kesiapan implementasi pengelolaan keuangan berbasis SIPD-RI. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92). Berikut ini hasil analisis sejauh mana kesiapan implementasi SIPD pada lingkungan Kecamatan Dusun Timur.

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain lain menggunakan media tertentu kepada pihak komunikan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana kebijakan. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan telah disampaikan secara jelas dan dapat dilakukan secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terkait pedoman penggunaan SIPD RI komunikasi telah berjalan secara efektif dan terarah. Efektivitas ini tercermin dari adanya kejelasan pembagian tugas dan fungsi (tupoksi) di setiap unit kerja serta konsistensi komunikasi antara pimpinan dan staf pelaksana dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Setiap aparatur memiliki pemahaman yang baik terhadap perannya dalam proses pengumpulan, pengelolaan, serta pelaporan data melalui sistem SIPD. Hal ini berdampak positif terhadap kelancaran arus informasi dan ketepatan waktu pelaporan, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kejelasan pedoman penggunaan SIPD-RI tercermin dari pola komunikasi resmi dan berjenjang yang dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga kecamatan melalui surat edaran, rapat koordinasi, dan forum daring. Proses ini memperkuat keseragaman pemahaman aparatur. Selain itu, pelaksanaan SIPD-RI didukung oleh dasar hukum yang kuat, yakni Permendagri Nomor 8 Tahun 2014, yang menjadi acuan jelas bagi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan data pemerintahan.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi internal di Kecamatan berlangsung secara konsisten dan terbuka. Camat secara aktif menekankan pentingnya koordinasi dan ketepatan informasi dalam pengelolaan SIPD, mengingat data yang dihasilkan digunakan oleh berbagai instansi lintas level pemerintahan. Rapat rutin dan koordinasi informal, seperti melalui grup kerja internal, turut memperkuat kesinambungan komunikasi tersebut. Dari hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan penerapan pedoman penggunaan SIPD-RI di Kecamatan Dusun Timur tergolong efektif, jelas dan berkesinambungan. Kejelasan pembagian peran, dukungan regulasi, serta budaya koordinasi yang terbuka menjadi faktor kunci dalam memastikan pelaksanaan program SIPD berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diharapkan.

B. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat tergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Di antara semua jenis sumber daya, manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kualitas, kompetensi, dan kapasitas sumber daya manusia akan sangat mempengaruhi sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terkait sumber daya cukup memadai seluruh aparatur, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan, telah memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam proses input serta pengelolaan data pada sistem. Mereka memiliki kemampuan teknis yang cukup dalam mengoperasikan aplikasi SIPD-RI dan menunjukkan sikap profesional dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian, hasil penelitian

juga menemukan bahwa keterlambatan pelaporan atau input data bukan disebabkan oleh rendahnya kompetensi SDM. melainkan oleh ketidaksiapan data pendukung yang berasal dari unit kerja lain. Operator dan bendahara umumnya telah siap melakukan penginputan, tetapi dokumen atau laporan kegiatan dari bagian pelaksana sering belum lengkap atau masih dalam proses rekapitulasi. Kondisi ini mengakibatkan tertundanya proses pelaporan pada sistem SIPD-RI. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa alur kerja yang melibatkan ketergantungan antar bagian, sehingga kurangnya koordinasi dan sinkronisasi menjadi penyebab lambatnya proses administrasi. Selain itu, bahwa variasi kemampuan dan integritas SDM turut mempengaruhi kecepatan penyusunan dokumen. Proses pengumpulan berkas pertanggungjawaban dapat menjadi lama ketika pegawai yang bertugas belum memiliki kecakapan yang memadai atau tidak disiplin dalam menjalankan kewajiban administratif.

C. Disposisi

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal yang penting dalam disposisi implementor antara lain sikap pelaksana, tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terkait pemangku kepentingan untuk pelaksana, terutama operator dan bendahara, telah memahami sistem SIPD dengan baik, mampu menyelesaikan proses input data sesuai jadwal, serta menunjukkan tanggung jawab dalam memastikan ketepatan dan kelengkapan laporan. Pimpinan kecamatan juga memberikan dukungan moral dan kepercayaan penuh, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan saling mendukung. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pelaksana SIPD ditunjuk berdasarkan kemampuan teknis dan hasil koordinasi antarbagian, bukan keputusan sepihak. Pelaksana yang dipilih memiliki kesiapan dan pemahaman sistem yang baik, serta aktif berkoordinasi jika terjadi kekurangan data. Mereka juga menunjukkan sikap cepat tanggap dan sigap dalam menindaklanjuti setiap kebutuhan pelaporan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi SIPD-RI telah berjalan efektif dari aspek kompetensi dan dedikasi aparatur. Aparatur mampu menjalankan tugas secara profesional dan konsisten, meskipun tanpa dukungan insentif tambahan. Namun, ke depan diperlukan kebijakan pemberian penghargaan atau bentuk motivasi lain yang lebih terstruktur, agar semangat kerja dan komitmen aparatur dapat terus terjaga mendukung keberlanjutan pelaksanaan SIPD-RI optimal

D. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering, bahkan secara keseluruhan, menjadi pelaksana berbagai kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik. Implementasi kebijakan, terutama yang bersifat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, menuntut adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara banyak pihak terkait. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif atau kurang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan, hal ini dapat menimbulkan ketidakefektifan serta menghambat jalannya kebijakan tersebut, sehingga tujuan yang diharapkan sulit untuk tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terkait panduan SOP, belum adanya SOP yang mengatur batas waktu pada tiap tahap pelaporan. Tanpa standar waktu yang jelas, setiap unit kerja menafsirkan sendiri urgensi tugas, sehingga muncul inkonsistensi perilaku kerja dan alur administrasi menjadi lebih panjang dari seharusnya. Berkaitan dengan juknis Camat berperan sebagai Pengguna Anggaran, Sekretaris Camat bertindak sebagai PPTK, bendahara mengelola pelaporan dan pengeluaran keuangan, sementara operator menjalankan fungsi teknis dalam penginputan data ke dalam sistem SIPD-RI. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa struktur birokrasi yang jelas berkontribusi besar terhadap kelancaran pelaksanaan SIPD-RI. Seluruh proses pelaporan, pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan berdasarkan alur yang telah diatur dalam sistem, sehingga tidak ditemukan tumpang tindih kewenangan ataupun kendala berarti dalam koordinasi antarbagian.

Faktor Penghambat Implementasi Pengelolaan Keuangan Berbasis SIPD-RI

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, terdapat sejumlah faktor penghambat dalam implementasi pengelolaan keuangan berbasis SIPD-RI di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor-faktor ini muncul baik dari sisi internal kecamatan maupun dari kondisi eksternal yang berkaitan dengan pemangku kepentingan serta sistem SIPD-RI sebagai berikut:

1. Ketidaktepatan waktu Juknis SIPD-RI

   Petunjuk teknis yang belum tersedia saat pembaruan sistem menyebabkan ketidaksamaan pemahaman dan kesalahan dalam proses input data. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pelaporan dan menurunkan efisiensi kerja. Dengan demikian, kehadiran juknis yang tepat waktu dan disertai sosialisasi rutin sangat dibutuhkan agar implementasi SIPD-RI dapat berjalan lebih terarah dan seragam. Selain itu, peneliti menemukan bahwa dinamika pembaruan sistem SIPD-RI juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas di tingkat daerah. Pembaruan tersebut sering kali menghadirkan tool atau fitur baru tanpa disertai pemberitahuan awal maupun dokumentasi teknis yang memadai. Ketika fitur baru muncul secara tiba-tiba, operator di daerah tidak dapat langsung menyesuaikan proses kerja dan harus menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat, baik berupa pemberitahuan teknis, juknis, ataupun sosialisasi lanjutan. Sebagai contoh, dalam modul pertanggungjawaban, munculnya menu terkait penomoran instansi menimbulkan kebingungan di kalangan operator karena fungsi dan prosedur penggunaannya belum dijelaskan secara rinci. Ketidakjelasan ini menyebabkan proses input tertunda, sementara pegawai harus memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sistem dan tidak menimbulkan kesalahan data.
2. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi aparatur

   Kompetensi aparatur belum merata, terutama dalam menyesuaikan diri dengan pembaruan sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain itu, keterbatasan jumlah personel dan beban kerja yang tinggi menyebabkan efisiensi kerja menurun. Rotasi pegawai juga berdampak pada kesinambungan pelaksanaan tugas, karena pegawai baru memerlukan waktu untuk beradaptasi. Di samping itu, keterbatasan jumlah personel dan tingginya beban kerja turut menurunkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya pada posisi strategis seperti bendahara, staf penata pelayanan operasional perencanaan keuangan. Pada beberapa kasus, beban kerja yang terpusat pada satu atau dua individu menyebabkan proses verifikasi, penginputan dan pelaporan menjadi bergantung pada kemampuan personel tertentu. Ketika bendahara berhalangan, cuti atau mengalami kelebihan pekerjaan, tidak selalu tersedia pegawai dengan kapasitas yang setara untuk mengambil alih fungsi tersebut. Situasi ini menjadikan proses administrasi tidak berjalan optimal dan berpotensi mengalami keterlambatan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan ini.
3. Terbatasnya sarana teknologi dan layanan teknis

   Keterbatasan perangkat keras menyebabkan proses penginputan data berjalan lambat, bahkan terkadang mengalami gangguan ketika memproses data dalam jumlah besar. Sementara itu, ketidakstabilan jaringan internet juga berdampak pada keterlambatan pelaporan, terutama saat batas waktu penginputan semakin dekat. Selain perangkat keras, kualitas jaringan internet juga menjadi faktor penghambat signifikan. Ketidakstabilan jaringan, khususnya saat beban data meningkat pada waktu-waktu tertentu, menyebabkan proses unggah dokumen dan sinkronisasi data sering terhenti. Di beberapa kecamatan, layanan internet berbasis Indihome yang digunakan hanya memiliki kapasitas sekitar 200 Mbps untuk penggunaan bersama, sehingga tidak mampu menjamin kecepatan dan stabilitas yang diperlukan ketika seluruh unit kerja mengakses SIPD-RI secara bersamaan. Keterbatasan bandwidth ini berdampak langsung pada keterlambatan pelaporan, terutama menjelang batas akhir penginputan, ketika volume transaksi meningkat drastis. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perangkat keras, penambahan kapasitas jaringan internet, serta perbaikan infrastruktur pendukung lainnya perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar berjalan optimal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari analisis data. Maka, penelitian dapat ditarik berdasarkan 4 indikator implementasi Edward III dan faktor penghambat sebagai berikut:

Implementasi pengelolaan keuangan berbasis SIPD-RI di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah kurang terimplementasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang (SIPD) Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat melalui empat indikator, yaitu komunikasi dan disposisi telah berjalan dengan baik, sementara indikator sumber daya serta struktur birokrasi belum optimal. Faktor penghambatnya, yaitu: 1). Ketidaktepatan waktu Juknis SIPD-RI, keterlambatan juknis menyebabkan kesalahan input data dan pelaporan tertunda, sehingga sosialisasi dan juknis tepat waktu sangat dibutuhkan. 2). Keterbatasan kapasitas aparatur, kompetensi belum merata, personel terbatas, dan rotasi pegawai menurunkan efisiensi; pelatihan dan pendampingan diperlukan. 3). Terbatasnya sarana teknologi, perangkat keras dan jaringan internet yang terbatas memperlambat penginputan data, sehingga peningkatan infrastruktur sangat diperlukan.

SARAN

Beralaskan temuan riset yang selesai dijalankan, peneliti menganjurkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta keterlibatan SKPD lainnya dalam penyelarasan penerapan SIPD, melalui peningkatan kapasitas SDM, integrasi data, serta pembentukan SOP bersama, sehingga penatausahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perlu dilakukan penambahan jumlah staf yang mengoperasikan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kecepatan respons. Selain itu, penting memastikan adanya dukungan cepat dari Pusdatin Kemendagri ketika terjadi error sistem, atau menunjuk koordinator di setiap wilayah guna menangani permasalahan secara lebih efektif.
3. Diharapkan SIPD RI dapat terintegrasi terhadap sistem keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat lainnya pada aspek ini Kementerian Keuangan. Penting untuk menyatukan SIPD RI dengan sistem keuangan yang dikelola oleh instansi Pemerintah Pusat.
4. Disarankan agar pemerintah daerah memberikan insentif lembur bagi petugas penginput data SIPD untuk mempercepat proses penatausahaan, serta meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis dengan narasumber pusat agar pemahaman aparatur semakin seragam dan mengurangi kesalahan teknis. Selain itu, perlu dilakukannya prosedur permohonan pengadaan dengan pihak ketiga guna mempercepat pemenuhan kebutuhan kegiatan dan mendukung kelancaran

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. (2016). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Naila, Citra (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. IPDN.

Rahman, A., & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm; Penerapan Sap Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Aceh. Ilmu Administrasi Publik, 3, 14–22.

Subarsono, A. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.Indonesia